

BAB II

Gambaran Umum

2.1 Gambaran Umum Kota Jakarta

2.1.1 Kondisi Geografis Kota Jakarta

Secara geografis DKI Jakarta terletak di Pulau Jawa dan tepat berada di antara $5^{\circ} 10' 00''$ LS – $6^{\circ} 22' 21,5''$ LS dan $106^{\circ} 41' 12,5''$ BT – $106^{\circ} 58' 24,2''$ BT dengan ketinggian 79 meter titik tertingginya di atas permukaan laut (mdpl) dan sebagian wilayah lainnya berada di bawah permukaan laut. Wilayah DKI Jakarta mempunyai iklim tropis dengan suhu tahunan rata-rata mencapai 27°C dengan 2.000 mm rata-rata jumlah curah hujannya.

Jakarta berada di sebelah selatan Laut Jawa; sebelah timur berbatasan dengan Kabupaten atau Kota Bekasi; sebelah barat berbatasan dengan Kabupaten atau Kota Tangerang serta sebelah selatan berbatasan dengan Kabupaten atau Kota Bogor dan Depok. Apabila dilihat dari wilayahnya, DKI Jakarta mempunyai luas daratan $661,52 \text{ km}^2$ dan luas lautan $6.977,5 \text{ km}^2$ serta tercatat kurang lebih mempunyai 110 pulau yang berada dan menyebar luas di Kepulauan Seribu.¹

¹ BPK RI. 2020. Pemprov DKI Jakarta

Gambar 2.1 Luas DKI Jakarta Menurut Wilayah Administrasi, 2020



(Sumber: Portal Statistika Provinsi DKI Jakarta, 2020)

Provinsi DKI Jakarta secara administrasi dibagi menjadi 1 kabupaten administrasi dan 5 wilayah kotamadya. Jakarta Barat mempunyai luas sekitar 124,44 km², Jakarta Selatan dengan luas sekitar 154,32 km², Jakarta Pusat mempunyai luas sekitar 52,38 km². Apabila dikaitkan dengan sarana pengelolaan sampah, wilayah Jakarta Pusat mempunyai Tempat Pembuangan Sementara (TPS) walaupun hanya berbentuk *container* dan bak beton yang berada di Menteng. Jakarta Utara dengan luas daratan 139,99 km² juga mempunyai sebuah TPST yang cukup luas, yaitu TPST Sunter yang sudah lama untuk menampung sampah di DKI Jakarta.

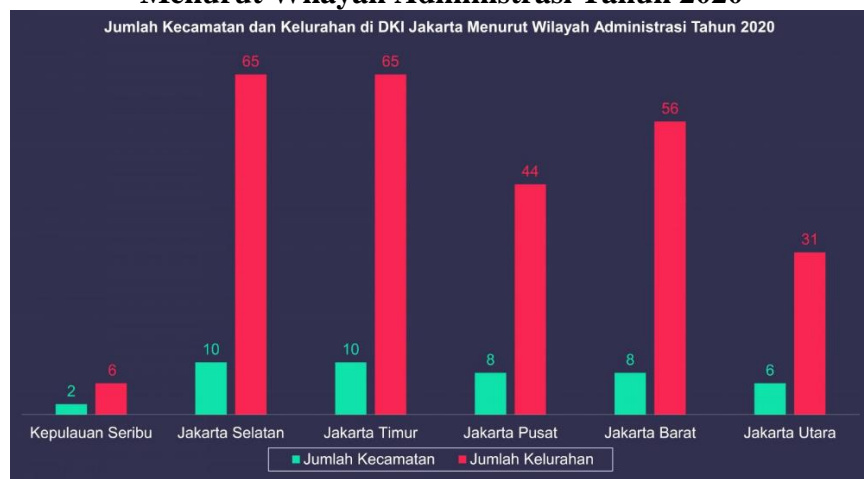
Jika dibandingkan dengan luas wilayah yang lainnya, Jakarta Timur adalah wilayah dengan bagian yang terluas dengan luas daratan 182,70 km². Faktor luasnya wilayah Jakarta Timur ini diikuti dengan banyaknya jumlah penduduk yang menetap di wilayah tersebut. Oleh sebab itu, banyak juga sarana atau fasilitas yang dibangun oleh pemerintah yang terdapat di Jakarta Timur. Salah satunya adalah

fasilitas TPS sampah yang dibangun di wilayah tersebut. Di wilayah Jakarta Timur terdapat 341 jumlah TPS sampah dan itu merupakan jumlah TPS terbanyak jika dibandingkan dengan daerah administrasi lainnya. Berbanding terbalik dengan Kepulauan Seribu yang hanya mempunyai luas sekitar 10,18 km².

2.1.2 Kondisi Demografis Kota Jakarta

Berdasarkan dari geografis dan luas wilayah tersebut, jumlah penduduk Provinsi DKI Jakarta mencapai kurang lebih 11 juta penduduk berdasarkan data dari BPS Provinsi DKI Jakarta tahun 2020 dengan kepadatan penduduk sekitar 13.667,01 jiwa per km² dan diprediksi tiap tahunnya akan mengalami peningkatan. Provinsi DKI Jakarta dibagi menjadi 1 kabupaten administrasi dan 5 wilayah kotamadya dan mempunyai 44 kecamatan dan 267 kelurahan.

Gambar 2.2 Jumlah Kecamatan dan Kelurahan DKI Jakarta Menurut Wilayah Administrasi Tahun 2020



(Sumber: Portal Statistika Provinsi DKI Jakarta, 2020)

Dilihat dari diagram batang di atas, Jakarta Timur dan Jakarta Selatan mempunyai jumlah kecamatan dan kelurahan yang sama dan terbanyak dibandingkan dengan yang lainnya yaitu dengan masing-masing 10 kecamatan dan 65 kelurahan. Berbanding terbalik dengan Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu yang hanya mempunyai 2 kecamatan dan 6 kelurahan di wilayahnya. Adapun untuk jumlah penduduk menurut wilayah administrasinya dapat dilihat pada tabel di bawah berikut.

Tabel 2.1 Jumlah Penduduk DKI Jakarta, 2020

Kota/Kabupaten	Jenis Kelamin		
	Laki-Laki	Perempuan	Jumlah
Kepulauan Seribu	14.726	14.374	29.100
Jakarta Selatan	1.178.116	1.174.336	2.352.452
Jakarta Timur	1.607.259	1.587.273	3.194.532
Jakarta Pusat	580.125	571.564	1.151.689
Jakarta Barat	1.285.381	1.261.724	2.547.105
Jakarta Utara	922.003	904.048	1.826.051
Total	5.587.610	5.513.319	11.100.929

(Sumber: BPS Provinsi DKI Jakarta, 2020)

Jika dilihat dari tabel di atas, jumlah penduduk wilayah administrasi Jakarta Timur adalah yang paling banyak penduduknya yaitu sebanyak 3.194.532 jiwa dengan perbandingan 1.607.259 laki-laki dan sebanyak 1.587.273 perempuan. Dilihat dari jumlah penduduk yang sangat penuh dan membludak seperti itu, tidak heran jika jumlah

sampah yang dihasilkan atau diproduksi juga yang paling tinggi di antara wilayah administrasi lainnya yaitu sebanyak 1.600 ton sampah per hari. Berbanding terbalik dengan Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu yang paling sedikit jumlah penduduknya yang hanya mempunyai jumlah penduduk sekitar 29.100 jiwa dengan perbandingan berjenis kelamin laki-laki sekitar 14.726 dan berjenis kelamin perempuan sekitar 14.374 jiwa.²

2.2 Gambaran Umum Dinas Lingkungan Hidup DKI Jakarta

2.2.1 Visi dan Misi Dinas Lingkungan Hidup DKI Jakarta

Berdasarkan dari luas wilayah dan jumlah penduduk yang besar di Provinsi DKI Jakarta seperti yang telah dijelaskan di atas, tentunya terdapat berbagai permasalahan lingkungan yang terjadi. Dibutuhkan suatu organisasi atau lembaga yang khusus untuk menangani permasalahan lingkungan hidup yang terjadi tersebut. Organisasi atau lembaga yang dimaksud tersebut adalah Dinas Lingkungan Hidup DKI Jakarta. Dalam hal ini, mereka mempunyai visi yaitu Jakarta Baru, Kota Modern yang Bersih dengan Masyarakat Berbudaya Bersih dan Pelayanan Publik yang Prima. Visi tersebut sudah ada sebelum kedua instansi digabungkan menjadi satu. Visi yang ditetapkan tersebut adalah komitmen untuk membantu mewujudkan visi dari Gubernur.

² BPS Provinsi DKI Jakarta. 2020 Jumlah Penduduk Provinsi DKI Jakarta.

Adapun visi tersebut dapat dijabarkan dengan 3 poin penting sebagai berikut:

1. Jakarta Baru, Kota Modern yang Bersih

Potongan dari visi tersebut adalah poin dari visi yang ingin dicapai oleh Dinas Lingkungan Hidup DKI Jakarta yaitu mewujudkan Jakarta Baru sebagai kota modern yang bersih. Tujuan dari poin pertama tersebut adalah seluruh masyarakat DKI Jakarta diharapkan dapat berpartisipasi mengelola sampahnya secara modern sehingga tercipta lingkungan yang bersih dan sehat.

2. Masyarakat Berbudaya Bersih

Poin kedua ini adalah tantangan terberat, karena untuk merubah suatu budaya dari masyarakat itu memerlukan waktu yang cukup lama dan juga dibutuhkan strategi yang tepat. Sangat sulit menjadikan Kota Jakarta yang bersih dari sampah tanpa adanya dukungan dari masyarakat itu sendiri. Oleh karena itu, visi kedua yang ingin diraih oleh Dinas Lingkungan Hidup DKI Jakarta adalah mewujudkan masyarakat Jakarta yang berbudaya bersih. Tujuan yang ingin dicapai adalah seluruh masyarakat DKI Jakarta:

- Mempunyai edukasi mengenai keharusan dalam mengelola sampahnya sendiri.
- Perilaku masyarakat dapat berubah untuk bisa membuang sampah pada tempatnya.

- Dapat menjadikan sampah yang tadinya tidak memiliki nilai menjadi dapat dimanfaatkan dan mempunyai nilai jual atau ekonomi.
- Dapat ikut berpartisipasi secara aktif dalam semua kegiatan mengenai pengelolaan sampah.

3. Pelayanan Publik Prima

Maksudnya adalah dapat melaksanakan tugas intinya dengan menerapkan konsep tata kelola pemerintah yang baik atau yang biasa kita kenal dengan *Good Governance*.

Untuk dapat mewujudkan visi tersebut, diperlukan juga sebuah misi. Selain dapat memberikan arah atau tujuan, misi juga dapat memberikan fokus pada kegiatan-kegiatan yang akan diimplementasikan nantinya serta untuk meningkatkan partisipasi dari semua pihak yang terkait. Adapun uraian dari misi yang pertama adalah dapat melaksanakan pengelolaan sampah dengan menggunakan teknologi yang modern dan juga tentunya ramah lingkungan dengan mengikut sertakan partisipasi dari pihak masyarakat maupun swasta. Kemudian adalah meningkatkan budaya masyarakat perkotaan yang mempunyai tingkat kepedulian dalam menjaga lingkungan agar bersih. Misi yang terakhir adalah meningkatkan pengelolaan pelayanan kebersihan dengan memakai konsep tata kelola pemerintahan yang baik.

2.2.2 Tujuan, Tugas dan Sasaran Dinas Lingkungan Hidup DKI

Jakarta

Dinas ini terbentuk pada akhir 2016 sejak diterbitkannya Peraturan Gubernur Nomor 284 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Lingkungan Hidup. Dinas ini terbentuk dari digabungkannya Dinas Kebersihan dengan Badan Pengelola Lingkungan Hidup Daerah (BPLHD). Tujuan dibentuknya adalah untuk membantu dan melaksanakan urusan pemerintahan khususnya di sektor lingkungan hidup. Dinas ini dipimpin langsung oleh seorang Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah.³

Dinas ini juga mempunyai tujuan untuk dapat menjawab visi dan misi tersebut, tujuan adalah dapat mengurangi sampah dan meningkatnya kualitas lingkungan hidup. Selain itu, Dinas Lingkungan Hidup DKI Jakarta juga mempunyai sasaran strategis yang ingin diraih, yaitu proses kinerja dan cakupan pelayanan pengelolaan sampah dapat meningkat, sampah di perkotaan dapat dikurangi dan diatasi dan Indeks Kualitas Lingkungan Hidup dapat meningkat.

Adapun menurut Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 284 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Lingkungan Hidup, untuk melaksanakan tugas Dinas Lingkungan

³ Rencana Strategis Dinas Lingkungan Hidup Provinsi DKI Jakarta 2017-2022.

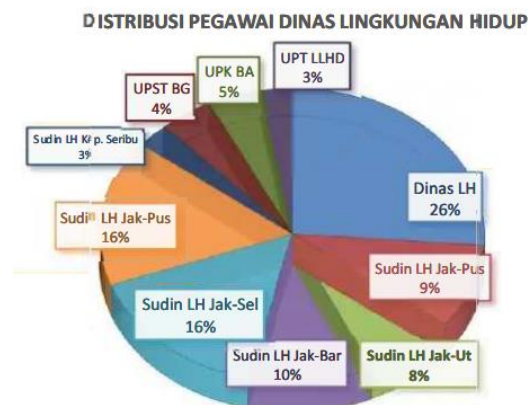
Penjelasan mengenai susunan organisasi adalah sebagai berikut:

1. Kepala Dinas memiliki fungsi dan tugas untuk melakukan atau menyelenggarakan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.
2. Wakil Kepala Dinas memiliki tugas untuk dapat membantu Kepala Dinas dalam penetapan kebijakan dan regulasi teknis.
3. Sekretariat memiliki tugas untuk melakukan urusan administrasi Dinas.
4. Bidang Lingkungan dan Kebersihan memiliki tugas untuk melaksanakan penataan lingkungan dan kebersihan.
5. Bidang Pengelolaan Kebersihan memiliki tugas untuk upaya pengendalian, pengelolaan sampah terutama limbah B3.
6. Bidang Pengendalian Dampak Lingkungan untuk pelaksanaan upaya pengendalian dampak lingkungan.
7. Bidang Pengawasan dan Penataan Hukum untuk menerima pengaduan dan mengatasi sengketa, melakukan pengawasan serta penegakan hukum.
8. Bidang Prasarana dan Sarana memiliki tugas dalam hal pengadaan sarana.
9. Bidang Peran Serta Masyarakat untuk pengembangan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan lingkungan dan kebersihan.

2.2.4 SDM, Anggaran dan Sarana Dinas Lingkungan Hidup DKI Jakarta

Salah satu faktor yang penting dalam mencapai target atau sasaran suatu program dan kegiatan bagi suatu instansi adalah sumber daya manusianya. Hal tersebut dikarenakan kinerja perangkat daerah ditentukan oleh kinerja para pegawai tersebut. Jika dilihat data dari Rencana Kerja Tahun 2017-2022, jumlah pegawai Dinas dan Suku Dinas Lingkungan Hidup serta UPT adalah sebanyak 1.008 orang Pegawai Negeri Sipil (PNS).

Gambar 2.4 Distribusi SDM Dinas Lingkungan Hidup Provinsi DKI Jakarta



(Sumber: Renstra 2017-2022 DLH DKI Jakarta)

Dari grafik tersebut dapat dilihat bahwa 26% jumlah presentase SDM yang paling banyak berada di Dinas. Sedangkan 74% lainnya distribusi pada 6 Suku Dinas dan 3 UPT. Untuk di Dinas Lingkungan Hidup DKI Jakarta per Februari 2022 jumlah PNS sebanyak 685 orang. Jika dilihat dari Analisis Beban Kerja (ABK) jumlah SDM yang ada belum memenuhi kriteria. Untuk memenuhi kebutuhan tersebut,

terdapat pegawai non PNS atau yang saat ini dikenal dengan PJLP sebanyak 13.349 anggota

Adapun ketika saat melakukan tugas pokok dan fungsinya, Dinas didukung oleh berbagai sarana atau fasilitas berupa kendaraan atau armada yang salah satunya adalah alat untuk mengangkut sampah. Fasilitas atau alat kendaraan pengangkut sampah yang biasanya dioperasikan adalah truk sampah dengan bak terbuka dan truk sampah kompaktor. Semua daftar armada pengangkutan sampah yang dimiliki oleh Dinas Lingkungan Hidup dapat dilihat pada tabel di bawah.

Tabel 2.2 Data Kendaraan Angkutan Sampah Dinas Lingkungan Hidup Provinsi DKI Jakarta

Data angkutan sampah	SKPD/UKPD									
	Dinas	Jakarta Pusat	Jakarta Utara	Jakarta Barat	Jakarta Selatan	Jakarta Timur	Pulu Seribu	UPKBA	UPS T	Grand Total
Truk Arm Roll Besar	19	27	34	31	30	37	-	1	-	179
Truk Arm Roll Kecil	13	28	26	26	40	43	-	3	-	179
Dump Truk/ Typer Besar	32	85	116	111	122	146	5	32	1	650
Dump Truk/ Typer Kecil	40	96	117	110	76	119	1	50	3	612
Tronton	1	-	5	7	9	9	-	8	-	39
Truk Kompaktor Besar	73	20	19	18	18	17	-	-	-	165
Truk Kompaktor Kecil	26	-	-	-	-	-	-	-	-	26

(Sumber: Renstra 2017-2022 DLH DKI Jakarta)

Dari banyaknya sarana dan prasarana yang disediakan Dinas Lingkungan Hidup tersebut tentu tinggi pula jumlah dana atau anggaran yang dikeluarkan oleh Pemprov DKI Jakarta pada Dinas Lingkungan Hidup Provinsi DKI Jakarta. Menurut situs Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) DKI Jakarta 2019 sebesar Rp 3,49 triliun.

Anggaran tersebut bukan hanya untuk pengelolaan sampah saja, tetapi total anggaran Dinas dan Suku Dinas Lingkungan Hidup Provinsi DKI Jakarta dan Unit Kerja Perangkat Daerah (UKPD) di bawah Dinas Lingkungan Hidup. Unit Pengelola Sampah Terpadu (UPST) mendapat anggaran tertinggi sebesar Rp 1,18 triliun, kemudian Unit Pelaksana Kebersihan Badan Air (UPK BA) sebesar Rp 659,9 miliar. Sementara itu, bidang Laboratorium Lingkungan Hidup Daerah (UPT LLHD) menjadi yang terendah yaitu sebesar Rp 19,9 miliar.⁵

2.3 Gambaran Umum Persampahan di Kota Jakarta

2.3.1 Kondisi Pengelolaan Sampah Kota Jakarta

Dalam rangka upaya menangani dan mengelola permasalahan sampah yang ada di Jakarta, Pemprov DKI Jakarta telah membuat Rancangan Induk Pengelolaan Sampah (RIPS) tahun 2012-2032. Rancangan itu kemudian masuk menjadi bagian dari Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2013 yang berisi mengenai Pengelolaan Sampah. Di dalam RPJMD

⁵ Hadya Jayani, Dwi Hadya. 2019. Anggaran Sampah DKI Jakarta. Diakses lewat Katadata.com pada Februari 2022.

telah memutuskan bahwa pengelolaan sampah ke dalam pandangan yang baru, yakni pengurangan sampah dari sumber. Hal itu bertujuan untuk mengurangi timbunan sampah dari sumber dan juga mengurangi volume sampah yang dikirim ke tempat pembuangan akhir.

Cara pengurangan sampah tersebut dapat dilaksanakan dengan membatasi timbunan sampah (*reduce*), memanfaatkan kembali (*reuse*), dan mendaur ulang (*recycle*) atau yang dikenal dengan istilah 3R. Pada tiap tahunnya pemerintah sudah mempunyai target persentase untuk penanganan dan pengurangan sampah. Mengurangi sampah dengan menggunakan sistem 3R tersebut tentunya memerlukan peran dari masyarakat. Akan tetapi, masih banyak masyarakat yang kurang berpartisipasi dalam pengelolaan sampah dari sumbernya.

Produksi sampah yang terjadi di Jakarta telah mencapai 7.000 ton lebih setiap hari dan semua sampah itu berakhir ke TPST Bantar Gebang di Kota Bekasi. Kebanyakan sampah yang diproduksi warga Jakarta tidak jauh berbeda dengan daerah lainnya. Permasalahan yang terjadi berikutnya adalah sampah yang dihasilkan dalam keadaan menyatu atau tercampur yaitu organik dan nonorganik. Tidak adanya proses memisahkan jenis sampah dari awal menyebabkan kesulitan tersendiri dalam hal pengelolaan sampah nantinya. Hal tersebut dapat terjadi sebab masih banyak masyarakat yang belum teredukasi secara baik mengenai fungsi dan manfaat dari memilah sampah. Sampah rumah tangga yang tidak bisa di daur ulang justru digabungkan dengan

sampah nonorganik yang mempunyai nilai jual seperti plastik atau bungkus makanan. Hal tersebut mengakibatkan nilai jual sampah plastik menjadi hilang dan akan berakhir di TPST Bantar Gebang secara percuma.

Faktor lainnya adalah ketersediaan bank sampah di lingkungan masyarakat masih jarang. Padahal ketersediaan bank sampah sangat penting dan sangat memudahkan petugas saat mengangkut sampah dari rumah tangga karena sampah yang dikumpulkan telah dipilah. Ditambah lagi sampah yang disumbangkan oleh kawasan mandiri seperti hotel, apartemen dan mal. Apabila berpedoman pada Perda Nomor 3 Tahun 2013 tentang Pengolahan Sampah yang isinya adalah semua pemilik kawasan mandiri diwajibkan atau diharuskan dapat mengolah sampahnya sendiri. Akan tetapi yang terjadi realitanya, kawasan mandiri masih banyak yang belum menerapkan sistem tersebut yaitu tanpa adanya proses pengelolaan sendiri.

Sampah yang membludak membuat kondisi TPST Bantar Gebang semakin penuh tiap waktunya. Terhitung sejak tahun 2015 jumlah sampah yang dikirimkan ke TPST Bantar Gebang sebanyak 6.419 ton per hari. Lalu pada data terakhir yang didapat pada tahun 2020 sebanyak 7.424 ton per hari dan diperkirakan akan terus mengalami peningkatan setiap tahunnya. Terus membludaknya produksi sampah yang dihasilkan sayangnya tidak dibarengi dengan sarana dan fasilitas pengelolaan sampah yang maksimal.

Kondisi tersebut membuat Pemprov DKI Jakarta mengeluarkan kebijakan atau Kegiatan Strategis Daerah untuk mengatasi permasalahan sampah yang terjadi. KSD tersebut meliputi program SAMTAMA, pengoptimalisasian TPST Bantar Gebang dan pembangunan FPSA. Namun di balik upaya yang dilakukan itu, kepedulian masyarakat adalah hal yang penting dalam mengatasi masalah sampah yang terjadi.

2.3.2 Jumlah TPS Kota Jakarta

Sampah merupakan barang yang sudah tidak terpakai yang dibuang dari hasil produksi sebuah industri maupun rumah tangga. Pemprov DKI Jakarta terus berusaha untuk meningkatkan kebersihan lingkungan untuk menciptakan lingkungan yang sehat dan bersih untuk masyarakat. Beberapa cara telah dilaksanakan oleh Pemprov DKI Jakarta seperti menyiapkan fasilitas untuk mendukung terciptanya kebersihan lingkungan, salah satunya adalah dengan adanya TPS sampah. TPS sendiri adalah tempat di mana sampah dikumpulkan sementara sebelum nantinya sampah akan dikirim ke tempat pengolahan sampah.

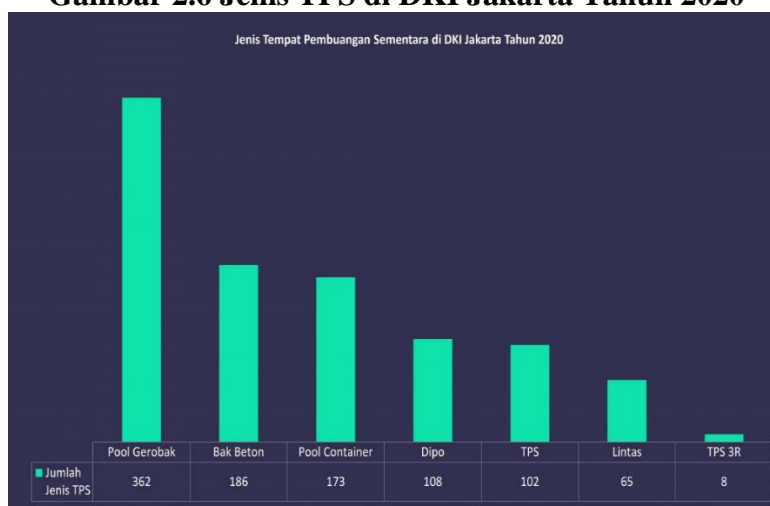
Gambar 2.5 Jumlah TPS di DKI Jakarta Menurut Wilayah Administrasi, 2020



(Sumber: Portal Statistika Provinsi DKI Jakarta, 2020)

Jika dilihat dari data di atas, jumlah total TPS sampah yang tersedia di DKI Jakarta mencapai 1.004 TPS yang menyebar di 5 wilayah kota administrasi pada tahun 2020. Berdasarkan data tersebut jumlah TPS yang paling banyak di DKI Jakarta berada di wilayah Jakarta Timur dengan 341 TPS, diikuti dengan Jakarta Barat yang mempunyai jumlah sebanyak 233 TPS, lalu Jakarta Utara dengan 165 TPS, kemudian Jakarta Selatan yang mempunyai 148 TPS dan jumlah TPS yang paling sedikit berada di wilayah Jakarta Pusat yaitu dengan 117 TPS. Wilayah Jakarta Timur mempunyai banyak TPS berbanding lurus dengan banyaknya jumlah penduduk di wilayah ini, sehingga memang sudah seharusnya memiliki TPS paling banyak.⁶

Gambar 2.6 Jenis TPS di DKI Jakarta Tahun 2020



(Sumber: Portal Statistika Provinsi DKI Jakarta, 2020)

Faktanya di lapangan, ada beberapa lahan TPS yang status kepemilikan lahannya dimiliki oleh perusahaan swasta, perumahan

⁶ Statistika Provinsi DKI Jakarta. 2020. Jumlah TPS DKI Jakarta.

ataupun milik warga pribadi. Dilihat dari jenis TPS, DKI Jakarta mempunyai tujuh jenis TPS. Jenis yang paling banyak adalah *pool* gerobak sebanyak 362 TPS, sedangkan jenis yang paling sedikit adalah TPS 3R hanya sebanyak 8 TPS.

Telah banyak cara yang dilaksanakan oleh Pemprov DKI Jakarta seperti contohnya dengan tersedianya sarana ataupun fasilitas untuk menunjang atau mendukung terciptanya kebersihan lingkungan. Semua TPS sampah yang telah disiapkan ini alangkah baiknya dapat dioperasikan dengan efektif supaya lingkungan tempat tinggal masyarakat dapat terjaga kesehatannya maupun kebersihannya.